



LAPORAN LKJIP

**TAHUN
2023**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KABUPATEN MAMUJU
TENGAH**

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan menciptakan Good Governance dan CleanGovernment.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 serta sekaligus sebagai evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Mamuju Tengah, 24 Maret 2024

Inspektur



Dr. SAKARIA K. S.Ag.,M.Pd.,MM.,CGCAE.,CIPA.
NIP 19731010 200003 1 005

Daftar isi

Kata pengantar	i
Pernyataan telah direviu	ii
Daftar isi	iii
Bab I pendahuluan.....	1
1.1 Gambaran umum pemerintah daerah.....	1
1.2 Data kepegawaian	4
1.3 Isu strategis.....	5
1.4 Sistematika Pelaporan	9
Bab II perencanaan kinerja	10
2.1 Rencana pembangunan jangka menengah daerah	10
2.2 Perjanjian kinerja 2023	11
2.3 Rencana anggaran tahun 2023	13
Bab III akuntabilitas kinerja	15
3.1 Pengukuran kinerja 2023	15
3.2 Analisis capaian kinerja	16
3.3 Realisasi Anggaran	27
Bab IV penutup	29
lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1 GAMBARAN UMUM

Kabupaten Mamuju tengah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju Tengah, sehingga diharapkan mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerja dalam menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan pemerintah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan tersebut meliputi :

- 1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.
- 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi.

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH		
Sekretariat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Inspektorat
BADAN		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KECAMTAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kecamatan pangale
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		Kecamatang budong- budong
DINAS		Kecamtan topoyo
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kecamatan tobadak

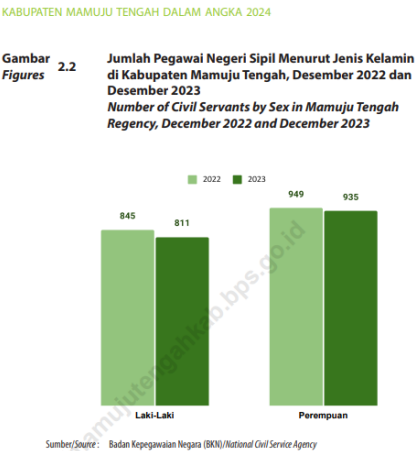
DINAS KESEHATAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan karossa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
DINAS SOSIAL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PERIKANAN	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
DINAS PERIKANAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
RSUD		

4) Urusan Penunjang Pemerintahan meliputi Perencanaan dan Pembangunan, Urusan Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan.

1.2 Data Pegawai

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah, Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mamuju Tengah berjumlah 1.746 .



1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah faktor-faktor yang dianggap penting dan akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di masa datang. Isu strategis tersebut dapat bersumber dari isu internasional, kebijakan nasional, kebijakan provinsi ataupun dari permasalahan pembangunan daerah. Hasil identifikasi isu strategis Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut.

Isu-isu global yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun ke depan bersumber dari pandemik Covid-19, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean. Isu-isu tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

1. Penghapusan kemiskinan
2. Pelayanan kesehatan yang inklusif
3. Pelayanan pendidikan yang inklusif
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
7. Kesempatan kerja yang produktif
8. Infrastruktur yang tangguh
9. Industri yang inklusif
10. Ketimpangan ekonomi
11. Perumahan dan pemukiman
12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan
13. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
14. Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
15. Degradasi hutan dan lahan serta keanekaragaman hayati
16. Masyarakat inklusif dan harmonis
17. Penanganan dampak pandemik Covid-19

Isu-isu nasional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun kedepan terutama bersumber dari RPJMN 2020-2024 yang dapat diidentifikasi berdasarkan agenda pembangunan nasional yang termuat di dalamnya yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Isu-isu regional provinsi bersumber dari RPJMD Provinsi, terutama yang terkait dengan program prioritas Gubernur yakni:

1. Pengembangan Trans-Sulawesi
2. Program Desa Mandiri, Sehat dan Cerdas

Isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia
2. Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah
3. Kemiskinan dan kesenjangan
4. Pembangunan pertanian, agribisnis dan agropolitan
5. Pengembangan UMKM
6. Perbaikan pelayanan publik
7. Tatakelola pemerintahan yang baik
8. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
9. Penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat
10. Penguatan jalur logistik barang dan jasa unggulan daerah
11. Penguatan pemerintahan kecamatan
12. Pembangunan desa
13. Fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan

Berdasarkan identifikasi dari level global, nasional, provinsi dan daerah tersebut diatas, terdapat rumusan isu yang berbeda tetapi substansinya sama, sehingga

diperlukan rumusan yang menggabungkan substansi yang relatif sama tersebut.

Dengan demikian, hasil identifikasi isu strategis dapat ditunjukkan sebagai berikut.

1. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan pendidikan
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
7. Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
8. Pengurangan ketimpangan ekonomi
9. Pembangunan infrastruktur dasar
10. Pembangunan perumahan dan pemukiman
11. Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
12. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
13. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
14. Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
15. Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
16. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
17. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
18. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
19. Perbaikan sistem pelayanan publik
20. Komunikasi, informasi dan teknologi digital
21. Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
22. Rehabilitasi dan perlindungan sosial
23. Pemberdayaan masyarakat
24. Penguatan pemerintahan kecamatan
25. Penguatan ketahanan desa
26. Penanganan dampak pandemik Covid-19

1.3.1 Prioritisasi Isu Strategis

Isu strategis yang telah diidentifikasi selanjutnya diberikan pembobotan melalui FGD yang di dalamnya masing-masing peserta memberikan penilaian terhadap

setiap isu berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis memiliki bobotnya masing-masing. Isu strategis yang memiliki nilai bobot paling tinggi menempati prioritas pertama dan berurut hingga yang terendah menempati prioritas terakhir.

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5	Kesesuaian dengan program prioritas kepala daerah	20
6	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Penilaian isu-isu strategis dengan menggunakan enam kriteria menghasilkan prioritisasi isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan dampak pandemik Covid-19
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan pendidikan
4. Penghapusan kemiskinan
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pembangunan infrastruktur dasar
7. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
8. Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
9. Perbaikan sistem pelayanan publik
10. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
11. Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
12. Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

13. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
14. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
15. Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
16. Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
17. Pembangunan perumahan dan pemukiman
18. Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
19. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20. Penguatan pemerintahan kecamatan
21. Rehabilitasi dan perlindungan sosial
22. Pemberdayaan masyarakat
23. Pengurangan ketimpangan ekonomi
24. Penguatan ketahanan desa
25. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi. Bab II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, Dokumentasi penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 – 2026 .

Visi

Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara

Misi

- (1) Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar
- (2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar
- (3) Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah
- (4) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
- (5) Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat
- (6) Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2023 yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah dengan sasaran Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan pembangunan
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak dengan sasaran Meningkatnya daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah dengan sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum dengan sasaran Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

6. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah .

2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana pada tahun 2023 Mamuju Tengah telah melakukan koordinasi dengan pihak KEMENPAN RB dan hasil koordinasi tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perubahan pada IKU dan Perjanjian kinerja pada Tahun 2023, seperti pada tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai Indeks	$(B \times N \text{ kemandapan jalan kabupaten} + B \times N \text{ Akses Air Minum Layak} + B \times N \text{ Akses Sanitasi Layak} + B \times N \text{ Pemukiman layak huni} + B \times N \text{ Rumah Layak Huni} / 5) \times 100\%$	Laporan Kinerja Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya daya Saing Sumber Daya Manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	$(B \times N \text{ Angka Rata-rata Lama Sekolah} + B \times N \text{ Angka Harapan Lama Sekolah} + B \times N \text{ Angka Harapan Hidup} + B \times N \text{ Pengeluaran Perkapita} / 4) \times 100\%$	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		3	Prevalensi Stunting	Persen	Jumlah anak balita stunting pada tahun n / total jumlah anak balita yang diperiksa pada tahun n x 100%	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	4	Angka kemiskinan (persen)	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^{\alpha}$ Dimana: α= 2 z= garis kemiskinan y_i= Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i= 1,2,3,...,q), y_i<z q= banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n= jumlah penduduk	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
4	Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: $R_{(t-1,t)}$ = laju pertumbuhan ekonomi (%) $PDRB_t$ = Jumlah PDRB tahun t (Rp) $PDRB_{t-1}$ = Jumlah PDRB tahun $t-1$ (Rp)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN RB	KemenPAN RB
		8	Nilai LPPD	Nilai	Hasil evaluasi LPPD	Bagian Pemerintahan Setda
		9	Opini BPK	Kategori	Hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPAD
6	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	10	Persentase Penurunan Gangguaan Ketertiban dan Keamanan	Persen	$PG\ K3 = \frac{GK3_{n-1} - GK3_n}{GK3_{n-1}} \times 100\%$ Dimana: PG K3 = Penurunan gangguan K3 $GK3_{n-1}$ = Jumlah gangguan K3 tahun sebelumnya $GK3_n$ = Jumlah gangguan K3 tahun ini	BPS Prov. Sulawesi barat
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	11	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (Nilai)	Nilai Indeks	IKLHD = IKA+IKU+IKL/3 X100% Dimana: IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET
1	TERPENUHINYA INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN	INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH	76,3
2	MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	67,14
		PREVALENSI STUNTING	15
3	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MSYARAKAT	ANGKA KEMISKINAN	6,13
		TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	1,85
4	PERKEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS KOTA TERPADU MANDIRI	PERTUMBUHAN EKONOMI	4,33
5	MENINGKATKAN AKUTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	CC
		NILAI LPPD	2,99
		OPINI BPK	WTP
6	TERPELIHARANYA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEURUNAN GANGGUAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN	100
7	TERPELIHARABYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLHD)(NILAI)	75,29

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 yang terdiri dari:

No	Uraian	Rencana (Rp)
1	Belanja operasi	448.674.067.204
2	Belanja modal	126.206.197.280
3	Belanja tidak terduga	9.500.000.000
4	Belanja tranfer	90.284.295.600
	JUMLAH	674.664.560.084

BAB III

Akuntabilitas kinerja

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 diukur dan dianalisis tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang tercermin dalam capaian sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidak berhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis. Analisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus:

% Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus:

% Capaian = $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel

Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif dan Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	<55	Kurang

3.1 Pengukuran Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	76,3	68,88	90,27
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,14	67,45	100,46
		Prevalensi Stunting	15	14,89	100,73
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,13	7,32	0,81
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,85	1,83	101,08
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	4,33	2,80	64
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	C	KURANG
		NILAI LPPD	2.99	-	-
		OPINI BPK	WTP	WTP	100
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	100	100
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	75,29	78,56	104,34

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. TERPENUHINYA INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN SASARAN 1

Sasaran ini diukur oleh Indeks Infrastruktur Daerah dengan realisasi 68,88 dengan target 76,3 dan capaian 90,27%. Berdasarkan hasil ini indeks infrastruktur daerah pada tahun 2023 belum memenuhi target. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang capaiannya 82,53% dengan realisasi 52 dari target 63 pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi realisasi dan capaiannya. Peningkatan Realisasi 16,88 dan peningkatan capaian 7,74.

Tabel Perbandingan pencapaian Sasaran Strategis 1 Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan												
No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Infrastruktur Daerah	%	65,13	73,41 %	62,08	84,57	63	52	82,53	76,3	68,88	90,27

Tabel Perbandingan Dengan Target Akhir RPJMD								
No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2023	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Indeks Infrastruktur Daerah	%	65,13	76,3	68,88	90,27	76,3	81,16

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor pendukung indeks infrastruktur daerah adalah kemantapan jalan kabupaten, akses air minum layak, akses sanitasi layak, pemukiman layak huni, dan rumah layak huni. Air minum dan Sanitasi, di mana realisasinya adalah 91% (akses air minum) dan 86,39% (akses sanitasi). Lain halnya dengan kondisi jalan baik atau pada kondisi mantap jalan, diperoleh capaian sebesar 51,66% atau dapat dikatakan hanya setengah dari target yang disebabkan adanya pembaharuan SK Jalan, di mana terdapat beberapa ruas yang menjadi kewenangan provinsi dan juga ruas yang belum dapat tergolong/masuk kedalam kewenangan kabupaten sendiri. Rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama waktu tertentu sebagai tempat melakukan aktifitas. Sementara target Presentase rumah yang layak huni di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 adalah 81,41 % sedangkan realisasi 81,54 % dengan capaian 100,16%, Target Presentase Permukiman layak huni 7,00 % sedangkan realisasi 87,73 % dengan capaian 1.253,29%, target presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) 53 % sedangkan realisasi 100% dengan capaian 189%, target presentase penurunan

rumah tidak layak huni rumah tangga miskin 18,85 dengan realisasi 18,464% dengan capaian 102%

faktor yang mempengaruhi sehingga capaian bisa mencapai sesuai target adalah :

- a Dukungan Pemerintah Daerah, DPRD dan *stakeholder* terkait di Kabupaten Mamuju Tengah yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
- b Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur Perumahan di Kabupaten Mamuju Tengah;
- c Potensi sumber daya alam Kabupaten Mamuju Tengah yang sangat strategis; dan
- d Perkembangan permukiman yang masih sejalan dengan penambahan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah;

Sedangkan faktor permasalahan pada pelaksanaan pemenuhan rumah layak huni adalah :

- a pelaksanaan kegiatan di tentukan dari balai perumahan dengan berpedoman pada data P3KE dimana data tersebut focus pada kesehatan dan penghasilan masyarakat bukan berpatokan Pada data E-RTLH yang mendetail ke RTLH.
- b Beratnya readnes criteria pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan terkhusus persyaratan penyediaan dana sharing dari APBD, sementara APBD sangatlah terbatas.
- c Rujukan data sering berubah-ubah dari E-RTLH, TNP2K, BDT, PKH, dan Data BKKBN, sehingga perlu penetapan kebijakan satu Data yang tidak berubah-ubah.
- d Faktor lainnya adalah adanya pengalihan kegiatan BSPS untuk penanganan bencana gempa bumi di mamuju sehingga butuh penanganan rumah korban bencana di mamuju dan majene.

Rasio Permukiman Layak Huni Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tengah luas wilayah permukiman dibagi menjadi 2 yaitu luas wilayah permukiman perdesaan dengan cakupan areal seluas 12.348,48 Ha dan luas wilayah permukiman kawasan perkotaan dengan cakupan areal seluas 707,56 Ha. Jadi total luas wilayah permukiman di Kabupaten Mamuju Tengah seluas 13.056,04 Ha. Adapun luas kawasan kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2021 seluas 75,17 Ha. Sehingga dari luasan kawasan permukiman dan kawasan kumuh dapat diketahui luas kawasan area permukiman tertata.

2. MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA SASARAN 2

Sasaran ini diukur oleh Dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan prevalensi stunting. Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada tahun 2023 dengan capaian 100.46%. Capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 tidak mengalami penurunan bahkan ada peningkatan capaian. Adanya peningkatan capaian pada Tahun 2023 juga dapat dibuktikan dengan membandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2022. Pada Tahun 2022 indeks pembangunan manusia mencapai 99,8% dengan realisasi 66,89 dari target 67,00. Berdasarkan data pada Tahun 2022 tersebut, maka dapat diketahui capaian Tahun 2023 lebih tinggi 0,66% dibandingkan dengan Tahun 2022. Sedangkan untuk prevalensi stunting capaian pada tahun 2023 adalah 100.73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya adanya peningkatan dimamuju tengah.

Tabel
Perbandingan pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia,2021-2023

No	IKU	satu an	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks pemban gunan manusia	%	65,71	66,34	66,18	100	67,00	66,89	99,8	67,14	67,45	100.46
2	Prevelensi stunting	%	8,15	8,15	14,19	2,11	8	14,69	16,37	15	14,89	100,73

Hasil pembangunan manusia dapat dilihat melalui indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2023, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 67,45. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

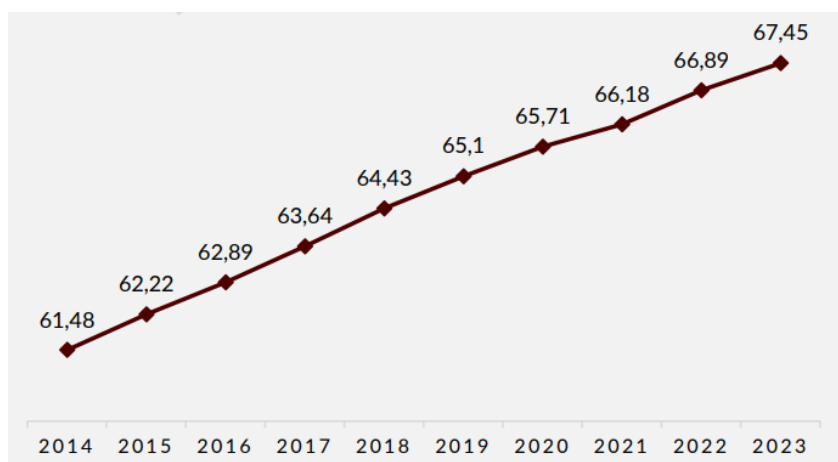
Tabel
Perbandingan Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2023	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Indeks pembangunan manusia	%	65,71	67,14	67,45	100,46	67,14	67,69
2	Prevelensi stunting	%	8,15	15	14,89	100,73	7,85	6,90

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi IPM yang meningkat statusnya pada Tahun 2023 sudah melebihi target dari target RPJMD sebanyak 67,14 %. Sedangkan untuk prevelensi stunting masih jauh dari target.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Dilihat dari klasifikasi IPM menurut UNDP, nilai IPM Mamuju Tengah pada tahun 2023 termasuk kategori sedang. Jika dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2023, IPM Kabupaten Mamuju Tengah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya sebesar 5,97 poin yaitu dari 61,48 pada tahun 2014 menjadi 67,45 pada tahun 2022. Hal ini berarti bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik, seperti program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang telah lebih dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Dari tahun 2014 hingga 2023, IPM Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan secara rata-rata sebesar 1,04 persen dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,66 poin di setiap tahunnya. Peningkatan IPM pada periode tahun tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik.



Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Mamuju Tengah , 2014-2023

Faktor pola asuh yang tidak benar yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi stunting. dalam upaya penurunan stunting, Kabupaten Mamuju Tengah telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga gizi seimbang pada anak, serta membantu menyalurkan suplay makanan maupun minuman bergizi pada anak dan balita. kabupaten mamuju tengah canangkan 37 kampung KB secara serentak. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Rapat Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dan Launching Program DASHAT. launching dashat dan kampung KB yg merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi gizi seimbang ibu hamil, baduta, balita, terutama keluarga miskin.pemerintah kabupaten mamuju tengah juga melibatkan peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting, peran desa tersebut dalam upaya pencegahan stunting adalah sebagai berikut:

Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan Stunting

- penyediaan air bersih dan sanitasi;
- pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;

- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Perencanaan pencegahan dan penanganan stunting, wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui:

- a. sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting;
- b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- c. pendataan terhadap kelompok sasaran;
- d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat;dan rembuk stunting desa.

2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT SASARAN 3

Sasaran ini diukur oleh Dua indikator yaitu Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2023 belum mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang telah ditentukan, dengan capaian 80,58% dengan target 6,13 dan realisasi 7,32. Garis kemiskinan Mamuju Tengah tahun 2023 adalah sebesar Rp. 309.227,-. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah tercatat sekitar 10,39 ribu jiwa atau sekitar 7,32 persen dari total penduduk. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada tahun 2023 dengan capaian 101.08%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 125,69% dari target 2,53% dan realisasi 1,88%.

Tabel
Perbandingan pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka kemiskinan	%	6,79	6,76	7,13	94,5	6,30	7,17	13,80	6,13	7,32	0,81
2	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,72	2,62	1,825	130,34	2,53	1,88	125,69	1.85	1,83	101.08

Tabel
Perbandingan Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2023	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Angka kemiskinan	%	6,79	6,13	7,32	0,81	6,13	5,50
2	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,72	1,85	1,83	101,08	2,52	2,44

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor angka kemiskinan mamuju tengah meningkat yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat, pendapatan masyarakat yang melambat. “Disisi lain pengeluaran dalam hal pembelian barang barang pokok dan penting lainnya tidak ikut turun, sehingga rata rata angka kemiskinan yang tadinya rentang itu sudah berada di garis kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tematik dalam penanggulangan kemiskinan daerah setempat.pemerintah kabupaten mamuju tengah telah menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada Orang miskin dan PPKS lainnya sehingga mereka lebih sejahtera dan mandiri, adapun bantuan – bantuan tersebut diantaranya:

1. Bantuan PKH,

Bantuan PKH ini langsung dari kementrian sosial RI untuk kepada penerima yang secara langsung menerima melalui rekening penerima dan didampingi Dinas Sosial melalui pendamping PKH Kabupaten Mamuju Tengah

2. Bantuan BPJS – KIS

Bantuan BPJS – KIS ini yang termuat dalam data BDT Dinas Sosial yang sumber pendanaanya yaitu dari APBN dan APBD melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Bantuan Jaminan Sosial Lainnya.

Adapun yang dimaksud bantuan jaminan sosial lainnya yang berupa siap saji dan bahan yang siap pakai yang langsung di rasakan masyarakat yaitu terkena musibah seperti Banjir, Kebakaran dan beberapa musiba/bencana lainnya.

3. PERKEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS KOTA TERPADU MANDIRI SASARAN 4

Sasaran ini diukur oleh indikator Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan capaian pada tahun 2023 64%. Meskipun belum mencapai target yang telah di tentukan. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Temgaj tahun 2023 tercatat sebesar 2,80 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Mamuju Tengah pada tahun 2023 adalah Transportasi dan Pergudangan mencapai 10,53%. jika ditinjau dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 9,84%.

Tabel
Perbandingan pencapaian Sasaran Strategis 4
Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota
Terpadu Mandiri

No	IKU	satu an	Kondis i awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pertumbu han ekonomi	%	-0,40	1,69	3,39	200,59	3,87	2,20	56,8	4,33	2,80	64

Tabel
Perbandingan Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2023	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Pertumbuhan ekonomi	%	-0,40	4,33	2,80	64	4,33	6,15

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

- 1. Perubahan Iklim: Variabilitas iklim seperti pola hujan yang tidak teratur, periode kekeringan atau banjir yang berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian. Dalam hal ini produksi Pangan sangat

terpengaruh oleh fenomena El-Nino dimana Sebagian besar lahan baku sawah di Mamuju Tengah adalah sawah tadah hujan yang hanya mengandalkan Air Hujan sebagai sumber pengairan.

2. Ketersediaan Prasarana Pertanian berupa Irigasi sangat mempengaruhi produksi Pangan terutama Padi. Di Mamuju tengah yang Sebagian besar adalah Sawah Tadah Hujan saat ini sudah mengalami alih fungsi lahan Pertanian menjadi Komoditas Kelapa Sawit yang harganya lebih stabil. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya pengairan untuk mengalir sawah produktif.
3. Alih Fungsi Lahan. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan luas baku sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan ke Kelapa Sawit. Hal ini sekali lagi Sebagian besar akibat tidak adanya irigasi Pertanian di semua sawah di Mamuju tengah.
4. Ketersediaan Sarana Produksi. Diantaranya adalah perubahan kebijakan kuota pupuk subsidi dan Kouta Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Ketersediaan Benih Berkualitas. Factor ini juga menjadi penghambat rendahnya capaian produksi. Terdapat kegiatan pengadaan benih untuk mengantisipasi Kejadian Bencana Puso yang diakibatkan kekeringan. Saat itu tidak tersedia benih unggul di pasaran yang tahan dengan kekeringan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi
6. Program Peremajaan Sawit Rakyat. Penurunan luas lahan produktif Kelapa Sawit akibat dari program peremajaan Kelapa Sawit. .

Adapun angkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi pemetaan di tingkat desa dan kecamatan dengan melibatkan seluruh unsur baik pemerintah desa, kecamatan, petani, dan swasta.
2. Perlunya penambahan jumlah PPL di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Perlunya peningkatan SDM khususnya bagi para petani agar dapat mengikuti perkembangan pertanian modern.

4. Harus ada pengusaha lokal yang menjamin pemasaran hasil pertanian petani Kabupaten Mamuju Tengah, perlu adanya branding produk lokal sehingga tidak diakui menjadi produk milik daerah lain, untuk komoditas tanaman pangan khususnya padi rencananya akan ada korporasi pangan.
5. Harus mendorong terbentuknya UKM yang mengolah hasil pertanian beserta fasilitasi bantuan alat pengolah hasil pertanian yang modern.
6. Sosialisasi mitigasi bencana pertanian sebagai upaya pengendalian bencana pertanian
7. Penyediaan benih pokok melalui pemberdayaan penangkar dan kelompok penangkar
8. Dukungan anggaran guna penyediaan infrastruktur sarana pengairan pertanian
9. Koordinasi dengan pihak pusat dan provinsi guna fasilitasi prasarana pertanian agar lebih memadai
10. Pembinaan dan penyuluhan teknik GAP (Good Agricultural Practices) adalah cara pelaksanaan budi daya tanaman pertanian (pangan, buah dan sayur) dan perkebunan secara baik, benar dan tepat.
11. Adanya koordinasi lintas sektoral guna pengendalian alih fungsi lahan produktif

4. MENINGKATKAN AKUTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN 5

Sasaran ini diukur oleh Tiga indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai LPPD dan Opini BPK. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya perubahan mekanisme penilaian. Indeks RB Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 adalah 44,36 dengan kategori “ C “. Nilai LPPD pada tahun 2023 belum dapat di jabarkan karena belum adanya hasil penilaian dari Kemendagri. opini BPK tahun 2023 tidak ada perbedaan dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu WTP dengan capaian 100% dan mencapai target pada tahun 2023.

Tabel												
Perbandingan pencapaian Sasaran Strategis 5												
Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah												
No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	C	C	C	100	CC	C	KURANG	CC	C	KURANG
2	Nilai LPPD	%	-	2,9	-	0	3	2,79	93	2.99	-	-
3	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Tabel								
Perbandingan Dengan Target Akhir RPJMD								
No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2023	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	C	CC	C	KURANG	cc	B
2	Nilai LPPD	%		2.99	-	-	3,01	3.04
3	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

5. TERPELIHARANYA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

SASARAN 6

Sasaran ini diukur oleh Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan pada tahun 2023 dengan nilai capaian 100% ini menunjukkan bahwa Upaya dan strategi diterapkan berhasil secara optimal dalam mengurangi jumlah insiden gangguan ketertiban dan kemananan di Kab.Mamuju Tengah.

6. TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SASARAN 7

Sasaran ini diukur oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada tahun 2023 dengan capaian 104,34%..

Tabel 3.7
Perbandingan pencapaian Sasaran Strategis 7
Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup

No	IKU	sa tu an	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	%	71,38	74,7	55	100	75,00	55	91,66	75,29	78,56	104,34

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Kinerja ini tidak terlepas karena adanya Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut dilaksanakan di 5 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan sasaran utama bagi usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Kegiatan yang dimaksud ialah pabrik/perkebunan kelapa sawit, perbengkelan, pengelolaan kayu, pabrik pengelola gabah, dll yang dianggap berdampak pada lingkungan. Pemantau dilaksanakan guna untuk mencegah sedini mungkin kelalaian dari pengelola baik yang tidak disengaja ataupun mungkin karena kesengajaan pelaku usaha/kegiatan.

Tabel
Perbandingan Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2023	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	%	71,38	75,29	78,56	104,34	75,29	76,00

3.3 Realisasi Anggaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Program penyelenggara jalan	Rp. 51.228.106.766	Rp.43.585.906.198	85.08%
		Program Pengelola Dan pengembangan sistem air minum	Rp. 13.877.367.994	Rp.12.893.140.985	93%
		Program penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan	Rp. 414.608.604	Rp. 381.142.309,-	92%
		Program kawasan permukiman	Rp. 416.528.861	Rp. 414.444.573	99.92%
		Program pengembangan perumahan	Rp. 206.901.352	Rp. 206.901.352	99,50%
Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 75.314.361.078	Rp. 21.886.189.054	75,91%
		Program pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.015.966.713	Rp. 46.908.749.555	99,77%
	Prevalensi Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 75.314.361.078	Rp. 21.886.189.054	75,91%
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Rp. 228.340.261	Rp. 222.340.261	97,37%
		Program pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.015.966.713	Rp. 46.908.749.555	99,77%
		Program Pengelola Dan pengembangan sistem air minum	Rp. 13.877.367.994	Rp.12.893.140.985	93%
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Msyarakat	Angka Kemiskinan	Program perlindungan dan jaminan sosial	Rp. 228.340.261	Rp. 222.340.261	97%
		Program Penyedia An Dan Pengemb Angan Sarana Pertania N	Rp. 1.692.128.650	Rp. 1.496.536.550	76.93%

	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Rp.77.700.393	Rp. 75.777.393	98%
		Program perencanaan tenaga kerja	Rp.42.947.979	Rp. 40.786.979	95%
Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.692.128.650	Rp. 1.496.536.550	76.93%
Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rp. 5.888.226.147	Rp. 2.391.084.303	59.39%
	NILAI LPPD	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 276.420.718.505	1.692.128.650	
	OPINI BPK	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rp.488.978.888 784.722.985	628.931.908	80.15%
Terpilihnya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Rp2.758.705.492	Rp2.758.705.492	100%
Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Rp. 100.800.990	Rp. 76,948,000	76%

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 7 (Tujuh) Sasaran Strategis dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa :

1. sebanyak 3 Indikator dicapai dengan “sangat baik sekali”, 4 Indikator dicapai dengan kategori “baik sekali”, 1 Indikator dicapai dengan kategori “baik”, 1 Indikator dicapai dengan kategori “Cukup, 1 Indikator dicapai dengan kategori “Kurang, serta 1 Indikator tidak dapat dilakukan perhitungan tingkat capaiannya
3. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2023 dikategorikan Baik Sekali dan tidak jauh berbeda dengan capaian kinerja pada tahun 2022. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, Sudah Sepenuhnya dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 12.6 / 007.1 / VIII/ 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ARAS TAMMAUNI
Jabatan : BUPATI MAMUJU TENGAH

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju Tengah, 01 Agustus 2023

BUPATI MAMUJU TENGAH

H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	76,3
2	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,14
		Prevalensi Stunting	15
3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	6,13
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,85
4	Berkembangnya Kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	4,33
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
		Nilai LPPD	2.99
		Opini BPK	WTP
6	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)(Nilai)	75,29

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggara Jalan	Rp. 51.228.106.766
2	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 13.877.367.994
3	Program Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp. 414.608.604
4	Program Kawasan Permukiman	Rp. 373.438.861
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 258.036.352
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 90.859.557.239
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.015.966.713
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 42.947.979
9	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 77.700.393
10	Program Perlindungan Dan Jaminan Social	Rp. 228.340.261
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.692.128.650
12	Program Peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.758.705.492
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 276.420.718.505
14	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 488.978.888
15	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 100.800.990

Mamuju Tengah, 01 Agustus 2023

BUPATI MAMUJU TENGAH

H. ARAS TAMMAUNI